



PENERAPAN DEMOKRASI KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI KECIL BERLANDASKAN PANCASILA

Natasya Susy Maryanti^{1*}, Susen Dorma Rumintan², Sari Octavia Riris³, Ying Pramija⁴, Sri Yunita⁵

Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

natasyawaruwu2020@gmail.com^{1*}, susendorma976@gmail.com²,

ririssrg026@gmail.com³, yingpramija29@gmail.com⁴, sr.yunita@unimed.ac⁵

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima : 11-11-2022

Direvisi : 14-12-2022

Disetujui : 16-12-2022

Kata kunci: demokrasi Pancasila, UUD 1945, kepemimpinan, organisasi.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup. Kata Demokrasi berasal dari istilah demokratia yang berarti aturan dari orang, merupakan paduan dari dua kata, demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintah. Tujuan dari penelitian ini yaitu, peneliti menggali peristiwa atau objek yang diteliti, seperti melihat cara seorang pemimpin dalam memimpin dan untuk mendapatkan informasi tentang sistem kepemimpinan demokrasi Pancasila dan UUD 1945 masih diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini memuat data-data yang telah penulis kumpulkan melalui wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan kedua orang pemimpin atau salah satu ketua organisasi kampus mengenai penerapan demokrasi kepemimpinan dalam organisasi yang berlandaskan Pancasila. Hasil penelitian ini berupa deskriptif.

ABSTRACT

Keywords: democratic Pancasila, UUD 1945, leadership, organization

Democracy is a form of government in which all citizens have equal rights to make decisions that can change their lives. The word democracy comes from the term demokratia which means "rule of the people", is a combination of two words, demos means people and kratos means power or government. The purpose of this study is that researchers explore the events or objects under study, such as seeing how a leader leads and to obtain information about the democratic leadership system of Pancasila and the 1945 Constitution, it is still being applied. This study uses a qualitative descriptive method as a translation method. This method will describe the data that the authors have collected through interviews, namely by holding direct questions and answers with the two leaders or one of the heads of campus organizations regarding the implementation of leadership democracy in organizations based on Pancasila. The result of this study is description.

*Author: Natasya Susy Maryanti

Email : natasyawaruwu2020@gmail.com

Pendahuluan

Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negaranya harus memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup (Abdillah, 2019). Dalam demokrasi warga negara diizinkan ikut serta baik secara langsung ataupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum (Hutabarat et al., 2021).

(Suryana et al., 2022) mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk kebebasan atau prinsip demokrasi dikatakan sebagai bentuk kebebasan, karena

melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun menambahkan apabila seseorang hidup tanpa adanya kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak ([Namang, 2020](#)).

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya adanya kekuasaan pemerintahan yang melekat pada rakyat sebagai bentuk HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri mereka dari setiap paksaan dalam suatu badan yang sedang memerintah ([Fossati et al., 2020](#)).

Menurut Abraham Lincoln demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ([Nugroho, 2013](#)). Kranemburg juga mengemukakan bahwa demokrasi harus sesuai dengan pengertian dasarnya yakni memerintah rakyat. Selain itu, Henry B. Mayo juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan sistem politik demokratis, pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum dan ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat pendapatnya ([Shenty, 2019](#)). Maka, dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah kebebasan rakyat dalam menyampaikan pendapatnya ([Terdjo, 2019](#)).

kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi ([Sanusi & Darmawan, 2016](#)). Dalam organisasi seorang pemimpin memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan dalam organisasi. dimana salah satu tujuan organisasi tersebut adalah menjadi lebih baik. Kepemimpinan sering juga dikaitkan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Maka dari itu, sifat kepemimpinan tidak selalu dimiliki oleh seorang "pemimpin". Bahkan Orang yang tidak memiliki jabatan juga bisa memiliki sifat kepemimpinan yang baik ([Sanit, 2015](#)).

Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama ([Ma'ruf, 2019](#)). Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku ([Widagdo, 2018](#)). Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain ([Pratiwi & Manafe, 2022](#)).

Penulis melakukan penelitian terhadap peran kepemimpinan yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula yaitu tentang demokrasi yang dilaksanakan oleh pemimpin dalam organisasi kecil berlandaskan UUD 1945 ([Handrian & Iwari, 2022](#)).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk

melakukan penelitian pada kondisi objek alamiah, yang mana peneliti merupakan instrumen kunci. Subjek penelitian ini adalah dua orang pemimpin organisasi di kampus.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan dua orang Pemimpin atau Ketua salah satu Organisasi kampus. Tanya jawab yang dilakukan saat wawancara dengan narasumber adalah mengenai Penerapan demokrasi kepemimpinan dalam organisasi kecil yang berlandaskan Pancasila. Waktu wawancara diadakan pada bulan Oktober melalui ruang virtual Google Meet. Teknik pengumpulan data ini dilakukan agar proses pengumpulan data dapat terarah dan tersusun dengan baik. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif dengan mengolah data yang telah terkumpul dan berbagai sumber literatur seperti buku dan jurnal menjadi hasil penelitian deskripsi.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan wawancara dilakukan melalui ruang Google meet dan chat WhatsApp kurang lebih satu jam pada bulan Oktober. Peneliti mewawancarai dua orang narasumber mengenai penggunaan demokrasi pancasila dalam kepemimpinan.

Proses penelitian kualitatif dimulai dari Proses penelitian kualitatif dimulai dari penyusunan asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Setelahnya penulis mengumpulkan data yang harus diriset. Kemudian peneliti memilih subjek yang sesuai untuk melaksanakan wawancara. Sebelum wawancara, peneliti membuat janji untuk mengadakan wawancara dengan subjek. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian terkait dengan beberapa pertanyaan yang peneliti diajukan, merujuk pada beberapa poin. Kepemimpinan harus mengacu terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan harus mampu menginterpretasikan nilai-nilai tersebut ke dalam peran dan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Nilai-nilai dalam kepemimpinan Pancasila adalah: Spiritual, Humanisasi, Nasionalis, Demokratis dan Keadilan Sosial (social justice). Nilai-nilai kepemimpinan tersebut sudah mengacu kepada kelima sila yang ada di Pancasila. Kepemimpinan Pancasila harus bisa bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan lebih menekankan nilai sila keempat. Pemimpin yang berbasis Pancasila akan mampu mengelola kebhinekaan dengan baik, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, serta menjadikan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Pertama, kepemimpinan yang dijalankan harus berlandaskan demokrasi Pancasila. Elkana menyatakan Kepemimpinan harus berlandaskan sila ke 4 Pancasila, sebagai contoh ketika di dalam kelas terlibat sebuah pemilihan atau masalah, ketua kelas mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan asas demokrasi dan juga berkewajiban untuk menghargai pendapat yang dikemukakan oleh orang lain apabila ada anggota kelas yang memaparkan pendapat. Selain dalam hal berpendapat, juga harus bisa berkomunikasi dengan baik terhadap atasan atau bawahan kita dalam sebuah organisasi dengan kata-kata

yang tepat sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain dan membuat orang lain mudah memahami maksud yang kita sampaikan. Kepemimpinan yang baik harus dilakukan secara normatif dan empiris. Normatifnya berlandaskan Pancasila sila 4 yang menjadi nilai dasar demokrasi harus dilaksanakan secara kerakyatan dengan mengenal sistem musyawarah mufakat (Fajar & Siregar, 2021).. Secara empirisnya, organisasi yang dipimpin olehnya senantiasa menerapkan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan putusan organisasi.

Kedua, pemimpin yang tidak menjalankan demokrasi pancasila tidak dapat dikatakan pemimpin yang baik. Jika seorang pemimpin tidak menerapkan demokrasi pancasila selama masa kepemimpinannya maka yang terjadi adalah kehidupan yang demokratis tidak terlaksana maka asas kedaulatan tiap individual tidak berjalan, tidak ada jaminan HAM, Jika demikian, justru akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan organisasi yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pemimpin yang tidak menjalankan kepemimpinan demokrasi Pancasila tentu akan menemukan kesukaran dalam melaksanakan amanahnya sebab Pancasila mengandung nilai demokrasi Indonesia yang sesungguhnya yang menjadi pandangan bersama masyarakat sehingga ketika seorang pemimpin yang tidak berpandangan pada Pancasila tentu akan lebih mudah menemukan ketidaksepahaman dan keterpecahan dengan pandangan anggotanya. Seperti yang kita ketahui Demokrasi Pancasila merupakan Penerapan konsep musyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang selama ini kita kenal di masyarakat juga merupakan bukti bahwa Demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, dan keseimbangan, di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Ketiga, menengahi perbedaan pendapat sesuai nilai demokrasi Pancasila an UUD 1945. Putra dalam pernyataannya cara seorang pemimpin menengahi pendapat sesuai demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yaitu dengan melakukan musyawarah mufakat sesuai nilai dasar sila 4 Pancasila. Dalam hal ini, pemimpin bersikap netral, memberikan kesempatan masing-masing pihak yang berseberangan pendapat tanpa memihak salah satu pihak dan tanpa melarang salah satu pihak berpendapat baik lisan maupun tulisan sesuai nilai Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. Pemimpin meminta pihak berseberangan memberikan penguatan bagi setiap pendapat nya yang kemudian memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak berseberangan pendapat untuk memberikan pandangannya yang kemudian pemimpin juga dapat memberikan pandangannya. Setelah masing-masing memberikan pandangan dan penguatan-penguatan maka seorang pemimpin dapat membuat mufakat bersama berdasarkan pendapat dan pandangan terkait putusan terbaik. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka seorang pemimpin berhak mengusulkan voting, pengambilan pendapat dengan suara terbanyak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kepemimpinan harus mengacu terhadap nilai-nilai yang

terkandung di dalam Pancasila dan harus mampu mengintepretasikan nilai-nilai tersebut ke dalam peran dan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang tidak menjalankan demokrasi pancasila tidak dapat dikatakan pemimpin yang baik sebab Pancasila mengandung nilai demokrasi Indonesia yang sesungguhnya yang menjadi pandangan bersama masyarakat.

Bibliografi

- Abdillah, M. A. (2019). Demokrasi dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 6(2), 1–18. <https://doi.org/10.32505/politica.v6i2.2732>
- Fajar, A. M., & Siregar, H. (2021). Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi Di Indonesia. *Communitarian*, 3(1). <https://doi.org/10.56985/jc.v3i1.141>
- Fossati, D., Aspinall, E., Muhtadi, B., & Warburton, E. (2020). Ideological representation in clientelistic democracies: The Indonesian case. *Electoral Studies*, 63, 102111. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102111>
- Handrian, A. F., & Iwari, M. I. (2022). Implementasi Gaya Kepemimpinan Demokratis pada Suatu Organisasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3), 707–711. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.707-711>
- Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N., Fadhila, N., Septiningrum, S., Aflita, R., & Ltubing, J. M. S. (2021). Makna Demokrasi Pancasila. *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business (Jhssb)*, 1(1), 59–64. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.61>
- Ma'ruf, M. (2019). Mengarahkan Demokrasi Pancasila (Relasi Demokrasi, Ekonomi Dan Politik). *CIVIS*, 8(2). <https://doi.org/10.26877/civis.v8i2.4695>
- Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247–266. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>
- Nugroho, S. (2013). Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam konsep Desa dan kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 40847. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2633>
- Pratiwi, N. M., & Manafe, L. A. (2022). GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS DALAM MEMOTIVASI KINERJA KARYAWAN: Kepemimpinan; Kepemimpinan Demokratis; Kinerja Karyawan. *Jurnal Visionida*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.30997/jvs.v8i1.5675>
- Sanit, A. (2015). Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. *Jurnal Politik*, 1(1), 155–176.
- Sanusi, A. R., & Darmawan, C. (2016). Implementasi pendidikan politik dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya pada generasi muda demi mewujudkan budaya politik pancasila (Studi deskriptif terhadap organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 24–40.

Shenty, D. P. M. (2019). *Kebebasan Berpendapat Menurut Teori Kebebasan Dan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia*.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/5cnym>

Suryana, C., Fatihah, N. A., Subki, M. T., & Maulani, M. I. (2022). *Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Terdjo, P. (2019). Demokrasi, Kebijakan Umum, dan Keputusan Politik. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 16(19), 116–134.
<https://doi.org/10.56444/mia.v16i19.1266>

Widagdo, Y. (2018). Hukum Kekuasaan dan Demokrasi Masa Yunani Kuno. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 1(S1), 44–65.

© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

